

Peran Humas Di Instansi Pemerintahan Kota Salatiga Dalam Penyebarluasan Informasi Program Kerja Pemerintah Stunting Melalui Media Sosial

Febryana Kayla Manuhara¹, Dian Novita Kristiyani²

Hubungan Masyarakat, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia.

e-mail: 602020030@student.uksw.edu¹, dian.kristiyani@uksw.edu²,

Abstract. Salatiga, a small city in Central Java Province with a population of 192,322 in 2020, faces significant social, economic, and health challenges due to overcrowding, namely stunting. This study examines the role of public relations in Salatiga city government in disseminating information related to the "Convergence Action" program, a government initiative aimed at reducing stunting, a health problem exacerbated by high population density. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results showed that the public relations of Salatiga City Government has an important role in fostering relationships, supporting management, and building the city's corporate image through social media. However, there are barriers to coordination, such as delays in disseminating materials for publication, which reduce active community participation and potentially slow down the reduction of the number of stunting. These barriers reduce the effectiveness of the stunting program's information dissemination and may interfere with achieving the program's objectives, highlighting the need for better communication strategies to increase community engagement and program success.

Keywords: Public Relations, Information Dissemination, Stunting, Social Media, Government

Abstrak. Salatiga yakni sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 192.322 jiwa pada tahun 2020, menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan akibat kepadatan penduduk, yakni masalah stunting. Penelitian ini mengkaji peran Humas di Pemerintah Kota Salatiga dalam menyebarluaskan informasi terkait program "Aksi Konvergensi," sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting yakni masalah kesehatan yang diperparah oleh tingginya kepadatan penduduk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Salatiga memiliki peran penting dalam membina hubungan (*relationship*), mendukung manajemen (*backup management*), dan membangun citra kota (*corporate image*) melalui media sosial. Namun, terdapat hambatan dalam koordinasi, seperti keterlambatan dalam penyebaran materi untuk publikasi, yang mengurangi partisipasi aktif masyarakat dan berpotensi memperlambat penurunan angka stunting. Hambatan ini mengurangi efektivitas penyebaran informasi program stunting dan dapat mengganggu pencapaian tujuan program, menyoroti perlunya strategi komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberhasilan program.

Kata kunci: Humas, Penyebarluasan informasi, Stunting, Media Sosial, Pemerintah Kota Salatiga

Pendahuluan

Kota Salatiga merupakan kota kecil di Provinsi Jawa Tengah dengan luas daerah 56,78 km², terdiri dari 4 kecamatan dengan letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang (BPS Kota Salatiga, 2021). Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Salatiga mencapai 192.322 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 3.387 jiwa/km² dan menempati posisi ke-6 dari 35 kabupaten/kota Jawa Tengah (BPS Kota Salatiga, 2021). Semakin banyak jumlah penduduk, maka permasalahan terkait kependudukan semakin bervariasi, seperti keterbatasan sumber kebutuhan pokok, keterbatasan pelayanan dasar dan keterbatasan lapangan kerja yang berisiko akan penurunan kondisi ekonomi, sosial masyarakat, serta Kesehatan masyarakat (Christiani et al., 2014).

Salah satu dampak dari permasalahan tersebut adalah meningkatnya kasus stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun (Aurima et al., 2021). Faktor penyebab tingginya angka stunting di Kota Salatiga adalah kurangnya edukasi kepada ibu dalam keseimbangannya pemberian asupan gizi kepada bayi dan anak dan asi yang tidak eksklusif. Kemudian menurut (Somantri, 2022) menjelaskan salah satu faktor lainnya seperti kurangnya metode pola asuh kepada anak, akses air bersih dan sanitasi serta kekurangan gizi yang kronis, penyebab lainnya yang perlu difokuskan seperti pengaruh budaya, sosial dan ekonomi.

Menurut Mann and Truswell (2002) balita atau anak yang mengalami stunting dapat menyebabkan gangguan terutama pada fisik dan mental. Balita dibawah 2 tahun yang mengalami stunting akan rentan terhadap penyakit dan akan berpengaruh pada tingkat produktivitas keseharinya serta kecerdasan yang kurang maksimal. Akibat dari stunting melibatkan beberapa faktor seperti ekonomi, kecerdasan, kualitas yang nantinya akan berkaitan dengan dengan masa depan anak bangsa. Maka dari itu

stunting adalah suatu hal yang penting dalam jangka Panjang (Dwi Purwanti et al., 2023).

Sehubungan dengan kasus stunting di Kota Salatiga, pemerintah membuat program "*Aksi Konvergensi*". Program ini dilaksanakan dengan penggabungan sumber daya di wilayah prioritas untuk menerapkan tujuan dari program tersebut. Dengan demikian penyelenggara program stunting di Kota Salatiga mengharap untuk selalu memberikan kontribusi dengan maksimal guna mewujudkan program penurunan stunting tingkat Nasional sampai ke periode 2024.

Membahas terkait peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang penurunan stunting, Bappeda mempunyai peran penting sebagai *leading sector* dalam program "*aksi konvergensi*" yang ditugaskan sebagai perencana dan pengarah dalam menyelenggarakan program tersebut, serta Bappeda akan menyalurkan antar lembaga terkait untuk mengkoordinasi kasus stunting (Dwi Purwanti et al., 2023). Untuk menjalankan program pemerintah terkait Stunting diperlukan kerjasama dengan Humas Pemerintah Kota Salatiga untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas. Penyebarluasan informasi terakit penurunan angka stunting sangat diperlukan guna membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya gizi untuk anak-anak dan masyarakat pun dapat mengetahui dampak jangka panjang dari kekurangan gizi.

Menurut Lattimore 210 dalam (Majid & Fitri, 2022) Humas memiliki 3 peran utama yaitu penjelas, komunikator dan fasilitator. Sebagai penjelas, humas membantu menjelaskan informasi yang kompleks atau sulit dipahami oleh masyarakat. Sebagai komunikator bertugas untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat. Sebagai fasilitator, humas memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan keduanya terpenuhi. Selain itu, humas dalam pemerintahan juga memiliki fungsi dasar yang penting meliputi membantu memperluas dan mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, mempublikasikan informasi yang relevan dan akurat, serta melakukan pengaturan sendiri dalam hal-hal tertentu.

Kemudian mengenai koordinasi di dalam penyebarluasan informasi program

kerja pemerintah stunting merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan program yang melibatkan dua atau lebih lembaga seperti Bappeda dan Dinas Kesehatan dan LSM karena menurut A.E.Benn 1952, di bukunya yang berjudul *The Management Dictionary* (dalam Hartono, 2016) adalah penyusunan usaha-usaha kelompok di dalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Dengan demikian peran dan fungsi humas dalam pemerintahan sangatlah vital dalam memastikan terciptanya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan publik. Dalam program “Aksi Konvergensi” selain kerjasama dengan Bappeda dan Humas, Pemerintah Kota Salatiga juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sebagian urusan daerah dalam bidang Kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya (Normaisa & Sudarmi, 2020).

Menurut Moore 2004 dalam (Lubis, 2012) Peranan Humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya. Pentingnya peran Humas instansi dan lembaga pemerintah dalam masyarakat modern yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di pemerintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain yaitu penyampaian informasi dan komunikasi.

Dalam penelitian lain yang berjudul “Aktivitas Media Relations Humas Setda Kota” berfokus pada bagaimana Humas Setda Pemerintah Kota Salatiga dalam menjaga hubungan baik dengan media traditional untuk menciptakan citra positif dalam Pemerintah Kota Salatiga (Pratiwi et al., 2015). Penelitian tersebut menganalisis peran media relations dan menelusuri cara Humas Setda Pemerintah Kota Salatiga memengaruhi pemberitaan dan memastikan liputan yang mendukung reputasi

Pemerintah Kota Salatiga. Kebaruan pada penelitian ini berfokus pada peran Humas Pemerintah Kota Salatiga dalam penyebarluasan informasi program kerja pemerintah terkait stunting “Aksi Konvergensi”. Penelitian ini mengkaji bagaimana informasi penting terkait program stunting dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana adaptasi Pemerintah Kota Salatiga terhadap perubahan lanskap komunikasi di media sosial menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat luas. Kemudian, penelitian ini berorientasi pada penggunaan media sosial untuk penyebarluasan informasi terkait program stunting “Aksi Konvergensi” di Kota Salatiga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut (Huberman & Miles, 2014) pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pada penelitian ini yang berjudul Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga dalam Penyebarluasan Informasi Program Kerja Pemerintah Stunting Melalui Media Sosial.

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti meliputi, observasi, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan serta beberapa dokumen yang peneliti perlukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman dalam (Sri Annisa & Mailani, 2023) kegiatannya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu melakukan penelitian ke lapangan dengan mengobservasikan penyebarluasan informasi program kerja pemerintah terkait stunting. Penyajian data yaitu data yang diperoleh telah dikategorikan kemudian disajikan dalam

bentuk narasi dengan tujuan menginterpretasikan data secara sistematis. Lalu membuat simpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan yang sudah melalui tahap reduksi. Hasil dari kajian ini dapat diuraikan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data yang disebut dengan triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber (Susanto et al., 2023). Triangulasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai proses pemeriksaan data melalui berbagai sumber data, teknik pengumpulan data yang dilakukan di waktu yang berbeda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam era digital seperti sekarang ini peran Humas di lembaga pemerintah menjadi semakin kompleks, dengan tantangan untuk menyebarluaskan informasi secara efektif. Media sosial dianggap sebagai sarana komunikasi yang paling efektif saat ini, memungkinkan khalayak untuk mengakses informasi dengan mudah. Dalam konteks ini, Humas memiliki peran perans dalam mengkomunikasikan program kerja pemerintah mengenai penurunan stunting melalui media sosial. Selain mengunggah informasi, Humas juga harus mengelola komunikasi dua arah yang efektif dengan masyarakat, serta menangani kritik dan saran yang diterima.

Stunting merupakan salah satu masalah yang masih diusahakan dalam penyelesaiannya oleh Pemerintah Kota Salatiga. Masalah stunting adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sendiri agar berhasil diatasi. Tim penurunan percepatan stunting yang dinaungi oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, hal ini menjadi peran penting dalam mengembangkan program kerja pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ruslan dalam (Anggraini & Setyanto, 2019a) dikatakan peranan utama seorang PR adalah sebagai komunikator atau penghubung antara perusahaan dengan publiknya. Peran diantaranya yang pertama adalah *Membina Relationship* yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan

publiknya. Kemudian peran yang Kedua, adalah *Backup Management* peranan ini sebagai pendukung dalam fungsi manajemen perusahaan yang sangat vital untuk memastikan kelancaran operasional dan keberhasilan jangka Panjang organisasi. Peranan yang ketiga yaitu, *Corporate Image* artinya peranan ini berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.

1. Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga Dalam membina *relationship*

Salah satu peran Humas Pemerintah Kota Salatiga adalah membina *relationship* dengan masyarakat dengan cara menanggapi pesan dan komentar pada postingan yang dipublikasikan pada media sosial maupun *platform* lainnya. Proses ini mencakup komunikasi terbuka dan transparan, mendengarkan kebutuhan serta kekhawatiran publik, dan merespons dengan tindakan nyata di lapangan. Melalui upaya ini, Humas Kota Salatiga membangun kepercayaan dan loyalitas publik, menciptakan citra positif, dan membangun dasar untuk kerjasama jangka panjang. Selain itu, hubungan baik dengan publik memudahkan penanganan krisis dan kritik serta membuka peluang untuk kolaborasi dan inovasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam program kerja pemerintah terkait stunting, peranan utama seorang Humas adalah sebagai komunikator yang menjembatani antara pemerintah dengan publik. Humas berupaya membina hubungan positif sebagai penyelenggara koordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan informasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting tersampaikan dengan jelas. Sebagai pendukung manajemen *Public Relations* atau Humas mengkoordinasikan peran komunikasi dan menangani isu-isu sensitif sesuai dengan perannya Humas untuk menciptakan citra positif. Humas akan membangun kepercayaan publiknya terhadap komitmen pemerintah dalam mengatasi penyebaran informasi terkait stunting sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kerja pemerintah stunting “Aksi Konvergensi”.

Keunggulan media sosial di dalam Humas Pemerintah Kota Salatiga adalah

mampu memuat semua hal terkait Kota Salatiga dan pemerintahannya. Berbeda dengan akun lembaga lain yang hanya memposting tentang bidang pekerjaannya, media sosial Humas Kota Salatiga menyebarkan berbagai informasi untuk masyarakat. Namun, diseminasi/penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Salatiga juga menghadapi hambatan yang memerlukan strategi dalam penyelesaiannya.

Menurut hasil wawancara dengan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga, sejauh ini hambatan yang dihadapi Humas dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat yaitu:

"Kendala sarana pra sarana seperti gangguan internet sehingga tidak dapat mendownload materi yang di upload, kendala berikutnya waktu karena terkadang dari verifikator terlambat memberikan berita jadi admin tekat mengupload, kendala lagi untuk menanggapi komentar-komentar atau pertanyaan pengguna media sosial kalau admin kan harus koordinasi dengan instansi-instansi terkait jadi mungkin adanya keterlambatan koordinasi pertanyaan tidak langsung bisa terjawab."

Hambatan dalam penyebarluasan informasi oleh tim humas tersebut dapat diatasi secara berkala. Misalnya kendala gangguan internet dalam mendownload materi dapat diatasi dengan dilakukannya sosialisasi di lingkungan RT/RW terkait dengan informasi yang diberikan. Informasi dalam wujud materi yang dibagikan dapat dijelaskan melalui tatap muka saat ada forum diskusi kecil di lingkungan RT/RW, sehingga informasi tersebut tetap dapat diterima dan diimplementasikan Masyarakat. Kemudian, untuk keterlambatan memberikan informasi bisa diatasi oleh tim humas dengan terus berupaya meningkatkan efektivitas koordinasi antar pihak dalam lembaga, sehingga informasi bisa disebarluaskan dalam waktu cepat.

Dalam mengunggah informasi, Humas harus memastikan bahwa informasi yang didapat akurat dan tidak simpang siur, tidak membahayakan bangsa dan negara, serta tidak menghambat proses penegakan hukum. Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga juga menambahkan melalui wawancara bahwa, *"Kami sebagai tim humas juga dituntut untuk memberikan informasi yang valid atau akurat sehingga informasinya bisa benar-benar bermanfaat dan tidak mencelakakan masyarakat."*

Di era digital saat ini, peran humas pemerintahan (*government public relations*) yang harus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat juga harus bisa menampung aspirasi publik melalui komentar di laman media

sosial. Oleh karena itu, Humas harus aktif menanggapi opini publik melalui media sosial. Peranan humas dalam penyebarluasan informasi publik sangatlah diperlukan termasuk peran komunikasi. Menurut Rogers (dalam Wijaya, 2015) peran komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Dalam mencapai tujuan dapat menjelaskan secara operasional bagaimana peran komunikasi yang dilakukan selama ini dan yang harus dilakukan kedepannya karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.

Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga dalam komunikasi dengan khalayak sangat diperlukan dalam penyebarluasan informasi. Peran yang matang ini mendukung keberhasilan perencanaan komunikasi. Humas Pemerintah Kota Salatiga menjalankan peran ini melalui upaya mengelola konten media sosial, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, melakukan publikasi (advertorial, release), berkomunikasi dua arah (jumpa pers), dan menangani komplain dari masyarakat melalui berbagai *platform* termasuk media sosial (Pratiwi et al., 2015).

a. Pengelolaan konten melalui media sosial.

Menurut (Nasrullah, 2014) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama berbagi berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam pengelolaan konten di media sosial, Humas Pemerintah Kota Salatiga juga menggunakan platform ini untuk menyebarluaskan siaran pers. Berikut merupakan penjelasan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga terkait hal tersebut:

“Kami juga menggunakan media sosial untuk menulis release atau berita dengan ketentuan 5W+1H harus sesuai dengan undang-undang pers, memahami urgensi OPD terkait harus bersumber dari wartawan resmi, memahami perkembangan informasi terkini dengan cepat dan tanggap”.

Melalui penjelasan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga di atas,

dapat diambil kesimpulan bahwa Humas Pemerintah Kota Salatiga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan siaran pers dengan tetap mematuhi ketentuan 5W+1H dan memastikan informasi bersumber dari wartawan resmi. Selain itu, mereka juga cepat tanggap terhadap perkembangan informasi terbaru dan teliti dalam menyaring data serta fakta untuk menghindari kontroversi dengan masyarakat. Menurut Priyani, sebuah berita yang baik haruslah memenuhi unsur 5W+1H. Rumus ini wajib diterapkan dalam sebuah berita, jika ada 1 unsur yang tidak dmasukan dalam sebuah berita (Priyani Putri et al., 2022) mengatakan

b. Pendekatan kerjasama

Humas sebagai corong Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menjalin relasi yang baik lebih dulu dengan media atau yang biasa disebut dengan istilah *media relations* (Pratiwi et al., 2015). Terkait pendekatan kerjasama Humas Pemerintah Kota Salatiga yang mereka lakukan, dikutip dari hasil wawancara dengan kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga:

“Di Pemkot sendiri ada tim penurunan stunting. bentuk kerjasamanya hanya sebatas apa yang kita ditugaskan ya kita publikasikan, dalam pengelolaan konten ini dibuat, paling banyak itu video yang nantinya kita publiskasikan melalui media sosial Humas maupun media sosial dari dinas sendiri.”

Media relations atau *press relations* menurut Frank Jefkins dalam (Setiawan et al., 2019) adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum (optimal) atas suatu pesan atau informasi untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak luas, mengenai organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

c. Publikasi melalui media sosial

Menurut *McGraw Hill Dictionary*, media sosial merupakan sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual (Awaliyah et al., 2021). Dalam publikasi terkait penyebaran informasi oleh Humas

Pemerintah Kota Salatiga ada beberapa Media Sosial yang efektif dan digunakan, dikutip dari hasil wawancara dengan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga mengatakan bahwa “... ada Instagram untuk mengupload rilis harian terkait kegiatan PJ Walikota serta programnya, Facebook juga sama dan Youtube, kalau Youtube biasanya digunakan ketika ada acara besar kita pakai untuk Live Streaming tapi kita juga mempublikasi kegiatan lainnya”. Dapat diketahui media sosial tersebut dimanfaatkan Humas Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan penyebarluasan informasi terkait segala program kerja pemerintah dan menjadi wadah komunikasi masyarakat untuk memberikan masukan maupun pendapat mengenai suatu berita yang dipublikasikan.

Humas pemerintah Kota Salatiga memanfaatkan Instagram, youtube, hingga facebook untuk penyebarluasan informasi. Menurut Setiawan dan Audie (2020) Instagram merupakan media sosial yang memiliki berbagai fitur-fitur pendukung seperti dapat mengunggah foto, membuat feeds, mengunggah Instastory, menggunakan filter pada foto dan juga terdapat like dan *followers* yang dapat mempengaruhi presentasi diri (Qurotul Putri Riyadi et al., 2024). Akun Instagram Humas Pemerintah Kota Salatiga @humaskotasalatiga telah memposting sebanyak 4.707 postingan berupa foto dan video yang besertakan keterangan atau release secara singkat. Humas Pemkot Salatiga memanfaatkan media sosial Instagram salah satunya untuk menyebarluaskan informasi mengenai stunting. Berikut merupakan salah satu publikasi release pada akun media sosial Instagram @humaskotasalatiga:

Gambar 1. Penyebarluasan informasi stunting melalui akun instagram @humaskotasalatiga



Dalam postingan tersebut, akun instagram @humaskotasalatiga mempublikasikan tentang instruksi pendataan balita terkait dengan upaya penurunan stunting di kota salatiga. Akun ini digunakan secara optimal untuk memposting konten visual dan informasi terkait stunting, dengan fokus pada upaya pemerintah terkait pencegahan stunting serta konten edukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting.

Selain Instagram Humas Pemerintah Kota Salatiga juga menggunakan media sosial **Youtube**. Dalam (Handayani, 2020) Youtube ialah sebuah situs website media yang digunakan untuk membagikan video secara online Pada akun Youtubanya Humas Kota Salatiga telah memiliki subscribe 3,97 ribu subscriber. Berikut merupakan salah satu publikasi video pada akun media sosial Youtube Humas Kota Salatiga:

Gambar 2. Penyebarluasan informasi stunting melalui akun youtube @humaskotasalatiga



Pada publikasi di atas, terlihat bahwa PJ Walikota Salatiga sedang melaksanakan forum diskusi pencegahan stunting di Kota Salatiga. Konten tersebut menjadi release berbentuk audio visual yang dikemas menarik, singkat, dan mudah dimengerti sehingga upaya pemerintah terkait pengurangan Tingkat stunting dapat diterima oleh Masyarakat. Tim dokumentasi dan publikasi di Humas Pemerintahan Kota Salatiga umumnya memposting video berdurasi 1 menit hingga 10 menit.

Media sosial lain yang digunakan oleh Humas Pemerintah Kota Salatiga adalah **Facebook**. Beberapa bagian dalam Facebook adalah *profile, news feed, wall, application, photo, video, poke, group, event, marketplace, post, notes dan gifts*. Setiap akun Facebook yang dimiliki seseorang dapat dilakukan aplikasi tersebut dan pengaktifan bagian yang terdapat dalam Facebook (Zunaida & Hayat, 2015). Berikut merupakan salah satu publikasi konten terkait stunting pada akun media sosial Facebook:

Gambar 3. Penyebarluasan informasi stunting melalui akun facebook @humaskotasalatiga



Pada postingan Facebook di atas, PJ Walikota Salatiga menyebarluaskan informasi berupa edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana selama ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat stunting di Kota Salatiga. Salah satunya adalah melalui program “Gercep Hanting: Gerakan Cepat Hempaskan Stunting”.

d. Melakukan komunikasi dua arah.

Dalam mengontrol arus informasi, Humas Pemerinta Kota Salatiga memberikan penerangan untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat. Menurut Lewis, komunikasi dua arah merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan tujuan, mengubah sikap, membentuk pendapat, menyampaikan instruksi dan menyiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan dengan situasi dn lingkungan organisasi (Ilpiyanto et al., 2022).

Humas Pemerintah Kota Salatiga mengcounter berita buruk

dengan berita tandingan dan klarifikasi melalui pesan pribadi atau komentar, menunjukkan pendekatan komunikasi dua arah yang responsif. Ini bertujuan menjaga transparansi, memperbaiki hubungan dengan publik, membangun kepercayaan, dan mengurangi dampak negatif. Hal ini divalidasi dengan pernyataan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga yang mengatakan, *“Kami selalu berupaya bertindak cepat untuk membalas berita buruk yang berpotensi menyebabkan krisis dengan klarifikasi baik itu berupa komentar pada media sosial maupun memberikan press release.”* Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen tim humas untuk berlaku responsif terhadap opini publik.

e. **Menanggapi komplain dari masyarakat melalui media sosial.**

Komplain atau keluhan bisa diartikan sebagai bentuk pengaduan atau penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, dan kemarahan atas pelayanan jasa atau produk (I Waine, 2020) . Dikutip dari hasil wawancara dengan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga: *“jika komplain tentang postingan Humas pasti langsung kita diskusikan secara langsung, tapi kalau komplain yang berkaitan dengan sektor dinas lain, kita koordinasi melalui via whatsapp atau virtual dengan yang berwenang, lalu kita lapor jika ada keluhan”*

Berdasarkan kutipan wawancara, peran Humas Pemerintah Kota Salatiga dalam menangani komplain dengan mendiskusikan secara langsung komplain tentang postingan Humas dan berkoordinasi dengan Dinas terkait. Komplain dari masyarakat harus dapat dipertimbangkan dalam penanganannya karena menurut Santoso komplain bukan dipandang sebagai ancaman, akan tetapi bisa juga menjadikan peluang bagi perusahaan untuk lebih baik dalam pelayanan (Ilpiyanto et al., 2022). Keterkaitan yang mendasar dari beberapa pelayanan yang disediakan oleh perusahaan akan berimbas pada konsumen (masyarakat).

Dari empat ~~peran~~ strategi komunikasi di atas seperti mengelola konten media sosial, menjalin kerjasama, melakukan publikasi, berkomunikasi dua

arah, dan menangani komplain dari masyarakat melalui media sosial adalah bagian dalam peran membina relationship.

2. Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga Sebagai *Backup Management*

Peran Humas dalam hal *Backup Management*, mewajibkan Humas bertugas untuk mengelola dan menjaga data serta informasi penting untuk pengambilan keputusan peran dan operasional. Selain itu peran ini menuntut humas untuk menjadi pendukung dalam fungsi manajemen organisasi (Hidayat & Putri, 2024). Peran ini penting untuk menjaga kontinuitas hubungan dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko. Secara keseluruhan, *Backup Management* memastikan informasi akurat dan up-to-date selalu tersedia untuk mendukung keputusan yang tepat dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga bahwa:

"Apabila terjadi masalah, pihak kami berupaya untuk merespon dengan memberikan solusi dan alternatif yang mampu untuk segera dieksekusi. Sehingga masalah yang terjadi tidak berlarut-larut dan tim humas bisa memitigasi resiko yang kemungkinan akan dihadapi. Selain itu, Backup Management selalu mengupayakan komunikasi yang efektif."

Konteks "memitigasi risiko" yang disampaikan oleh kasubag humas Pemerintah Kota Salatiga tersebut adalah upaya untuk mengurangi atau mengendalikan potensi dampak negatif dari masalah yang mungkin muncul. Dengan segera merespon dan memberikan solusi serta alternatif yang cepat diimplementasikan, tim humas berupaya mencegah masalah menjadi lebih besar atau berlarut-larut. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian atau konsekuensi yang berpotensi untuk terjadi di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam penanganan stunting, tim Humas Pemkot Salatiga selalu dengan cepat mengakomodasi forum diskusi dengan masyarakat, menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media, hingga memberikan edukasi yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh masyarakat sehingga risiko peningkatan stunting dapat segera diatasi.

3. Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga Dalam Membangun *Corporate Image*

Peran yang terakhir adalah membangun *Corporate Image* dalam publikasi media sosial di Humas Pemerintah Kota Salatiga adalah upaya peran yang membentuk dan mengelola persepsi *public* tentang identitas, nilai, dan reputasi organisasi melalui konten dan rilis singkat yang konsisten, menarik, dan autentik yang sebagaimana mencakup beberapa aspek seperti visual yang menarik mengikuti trend terkini, pesan-pesan yang mencerminkan misi dan visi Humas Pemerintah Kota Salatiga, serta interaksi yang profesional dalam penggunaan media sosial dengan tujuan meningkatkan kepercayaan, loyalitas dan dukungan dari audiens yang lebih luas. Berikut merupakan salah satu konten untuk membangun *corporate image* melalui program stunting dan dipublikasikan melalui laman media sosial Instagram @humaskotasalatiga:

Gambar 4. Postingan Instagram @humaskotasalatiga terkait kegiatan program kerja pemerintah stunting



Gambar di atas menunjukkan Pemerintah Kota Salatiga, melalui PJ Walikota Salatiga yakni Sinoeng N. Rachmadi, bersama Dinas Pendidikan, melakukan upaya untuk mencapai target penurunan angka stunting hingga 0 persen dan penurunan angka kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2024. Target tersebut dikatakan tidak mudah, namun PJ Walikota tetap optimis target tersebut tercapai apabila terus berupaya dan

didukung oleh berbagai pihak. PJ Walikota mengaja semua pihak untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam upaya tercapainya target tersebut dengan semangat gotong royong.

Peran OPD terkait dalam program percepatan penurunan Stunting di Kota Salatiga

Selain peran tersebut di atas juga terdapat peran tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Upaya untuk mempercepat penurunan stunting sudah menjadi program prioritas pembangunan di Kota Salatiga. Upaya ini akan berhasil bila dalam program melaksanakan secara konvergen. Dalam penelitian oleh Purwanti dengan judul "Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022" dijelaskan bahwa konvergensi berdasarkan *Global Nutrition International* diartikan sebagai Gerakan yang terkoordinasi, terintegrasi, dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk menetapkan target prioritas stunting hingga mencapai tujuan (Purwanti et al., 2023). Dalam program ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran sebagai *leading sector* dan koordinator dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi percepatan penurunan Stunting di Kota Salatiga. Bappeda mempunyai peran sebagai perencana dan pengarah dalam menjalankan program.

Selain itu, Bappeda dinilai mampu menemukan jalan untuk memudahkan berkoordinasi antar Lembaga pemerintah yang dinaungi. Secara implisit koordinasi ini meliputi beberapa langkah yaitu Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi. Perencanaan dalam koordinasi ini memiliki 3 aksi yang perlu dilakukan, mulai dari aksi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan dan rebus stunting. Menurut wawancara dengan pihak Bappeda, sebelum melakukan kegiatan perencanaan maka dilakukan analisis situasi dengan mengidentifikasi prevalensi stunting, situasi ketersediaan program dan praktik penyampaian. Berikut merupakan pernyataan dari pihak Bappeda yang sejalan dengan pernyataan di atas:

"Sebelum melakukan kegiatan perencanaan, kami selalu memulai dengan analisis situasi. Kami mengidentifikasi prevalensi stunting, meninjau situasi ketersediaan program, dan memeriksa praktik penyampaian yang

ada. Setelah itu, kami melanjutkan dengan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program ini dijalankan dengan baik oleh OPD yang berada di bawah naungan Bappeda, sesuai dengan perintah Pemerintah Kota."

Dalam program ini Bappeda bertanggung jawab memperbaiki dan mengarahkan kebijakan, serta aktif dalam rapat koordinasi dan dukungan teknis untuk intervensi. Mereka juga berkoordinasi dengan tim Penanggulangan Kemiskinan mengenai program percepatan penurunan stunting. Namun, tidak ada rapat khusus untuk evaluasi realisasi program stunting oleh OPD. Selain Bappeda, Dinas Kesehatan dan LSM juga terlibat. Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi pencegahan stunting, yang kini dipermudah dengan bantuan media sosial. Berikut adalah nukilan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan terkait peran Dinas Kesehatan dalam program percepatan penurunan stunting:

"Peran dari Dinas Kesehatan sendiri ya pastinya menyelenggarakan penyuluhan serta edukasi bersama masyarakat terkait stunting, lalu kita punya tim untuk edukasi terkait gizi balita sampai anak, memberikan suplemen secara gratis kepada balita atau anak yang stunting. Karena, ya dari Langkah Langkah tersebutlah yang nanti nya akan mempengaruhi angka penurunan stunting."

Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa peran Dinas Kesehatan meliputi edukasi dan fasilitatif. Peran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena keterbatasan mereka dalam mencari informasi secara mandiri karena peran ini mencakup penggunaan komputer, penyajian laporan lisan dan tertulis, serta penanganan proyek pembangunan fisik yang membutuhkan keterampilan teknis (Baturangka et al., 2019). Dinas Kesehatan menggunakan peran seperti WhatsApp untuk tutorial makanan bergizi, promosi ASI eksklusif, dan pengenalan ibu-ibu kepada LSM untuk penurunan stunting. Dalam hal ini peran LSM juga membantu masyarakat dengan pola asuh dan gizi yang baik untuk masa depan anak-anak.

Dari peran Dinas Kesehatan tentunya ada hambatan penyebarluasan informasi yang dialami selama proses program tersebut berjalan. Hambatan yang ditemui oleh Dinas Kesehatan dalam penyebarluasan informasi dengan masyarakat yaitu masyarakat tidak mengetahui adanya program pemerintah terkait stunting. Dengan adanya hambatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan telah mengambil inisiatif untuk membuat grup WhatsApp yang berisi ibu-ibu dengan balita di setiap kampung. Hal

ini diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi secara lebih efektif dan langsung.

Hambatan yang ditemui dalam koordinasi dengan OPD terkait.

Pada umumnya koordinasi dalam komunikasi antar organisasi sangatlah penting. Koordinasi termasuk salah satu proses administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Handyaningrat (1989:129) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi adalah, hambatan dalam **koordinasi vertikal (Struktural)** yang sering disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab di satuan kerja (*unit-kerja*) kurang jelas. Koordinasi vertikal dalam konteks program stunting di Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mengacu pada alur komunikasi dan instruksi yang berjalan dari tingkat atasan ke bawahan dalam struktur organisasi pemerintahan. Hal ini melibatkan berbagai unit kerja yang memiliki tanggung jawab berbeda tetapi saling terkait dalam pelaksanaan program. Selain itu instruksi kerja yang kurang dipahami oleh lembaga yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keraguan diantara mereka. Yang kedua hambatan dalam **koordinasi fungsional baik** yang *horizontal* maupun *diagonal* disebabkan karena antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkir (*garis komandi*). Sedangkan, hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing (Priyani Putri et al., 2022). Koordinasi fungsional, baik horizontal maupun diagonal, dalam program stunting mengacu pada hubungan kerja antar unit atau lembaga yang tidak berada dalam satu garis komando langsung, tetapi memiliki fungsi yang saling bergantung. Dalam konteks ini, koordinasi antara Humas Pemkot Salatiga dengan Dinas Kesehatan dan Bappeda menunjukkan adanya ketergantungan fungsional. Hambatan fungsional terjadi ketika komunikasi tidak lancar antara unit-unit ini, seperti dalam kasus keterlambatan Dinas Kesehatan mengirimkan materi kepada Humas untuk

diberitakan. Hal ini menunjukkan kurangnya interaksi yang efektif antara unit yang mengkoordinasi dan yang dikoordinasikan, sehingga menghambat penyebaran informasi terkait program stunting. Adapun hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Humas, Bappeda, LSM dan Dinas Kesehatan, sesuai dengan wawancara dengan Kasubag Humas Pemerintah Kota Salatiga “... kalau rapat eksternal nanti yang banyak melakukan dari dinas kesehatan, kalau internal biasanya dinkes mengirimkan materi humas tidak langsung mengikuti rapat-rapat stunting, jadi yang lebih inti dari kegiatan di lapangan adalah Bappeda dan Dinkes.”

Dalam pelaksanaan program stunting, hambatan vertikal di Salatiga mungkin muncul karena adanya masalah dalam perumusan tugas dan tanggung jawab, serta instruksi yang kurang dipahami oleh unit-unit kerja terkait. Hal ini dapat menyebabkan implementasi program tidak berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, mengakibatkan kesulitan dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah tersebut.

Pemimpin yang efektif di Salatiga harus mampu mengatasi hambatan-hambatan koordinasi vertikal dan fungsional dalam pelaksanaan program penanganan stunting agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, setelah Humas Pemkot Salatiga aktif menyebarkan informasi terkait stunting melalui berbagai platform media sosial, terdapat indikasi bahwa pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap isu stunting mulai menunjukkan perubahan yang positif. Namun, untuk menilai dampak program ini secara lebih akurat, diperlukan data empiris dari jurnal atau penelitian yang memeriksa perubahan prevalensi stunting dan adaptasi perilaku masyarakat setelah implementasi program tersebut.

Pemimpin yang merangkul dan beretika baik dapat membangun koordinasi antar sektor dan oposisi dalam peran kepemimpinan. Menurut (Ginting et al., 2023) pemimpin efektif memastikan hal yang tepat terlaksana oleh orang yang tepat, pada waktu dan tempat yang tepat. Pemimpin yang efektif memainkan peran penting dalam memastikan program stunting dijalankan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Di Salatiga, program penanganan stunting melibatkan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Humas

Pemkot, yang bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai stunting. Humas Pemkot Salatiga menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya stunting, pencegahan, serta pentingnya nutrisi bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hasil dari upaya pemerintah Kota Salatiga dapat terlihat dari data dari Bappeda Salatiga yang menunjukkan penurunan angka stunting, sejak Januari 2023 sampai dengan Juli 2023 mengalami penurunan sebesar 43,72 persen (Purnomo et al., 2023).

Penutup (12)

Kesimpulan

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini mengungkapkan peran penting Humas Pemerintah Kota Salatiga dalam penyebarluasan informasi terkait program penanganan stunting melalui media sosial. Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara berbagai lembaga seperti Bappeda, LSM, dan Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, termasuk gangguan internet, keterlambatan publikasi, dan masalah koordinasi yang disebabkan oleh faktor emosional serta sikap individu.

Koordinasi yang tidak optimal di antara lembaga-lembaga terkait berpengaruh negatif terhadap penyebarluasan informasi penting, seperti "aksi konvergensi," yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dan memperlambat penurunan angka stunting di Kota Salatiga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan koordinasi melalui rapat rutin, serta pelatihan bagi staf Humas mengenai pentingnya kecepatan dan akurasi informasi. Selain itu, pemanfaatan media sosial secara optimal dan pembentukan tim khusus untuk

merespons umpan balik dengan cepat akan mendukung efektivitas komunikasi. Peran Humas Pemerintah Kota Salatiga tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memastikan koordinasi antar lembaga seperti Bappeda, LSM, dan Dinas Kesehatan.

Dalam program kerja pemerintah stunting peran Bappeda membantu menjalankan program percepatan penurunan stunting, sementara Dinas Kesehatan mengedukasi masyarakat dan memberikan solusi terkait stunting. Hambatan koordinasi secara internal yang terjadi seperti keterlambatan oleh OPD terkait untuk pengiriman materi yang harus dipublikasikan dan kurangnya koordinasi sehingga dapat mengurangi efektivitas penyebaran informasi. Dampak yang ditemukan seperti informasi penting seperti "*aksi konvergensi*" tidak tersebar secara menyeluruh akibatnya akan mengurangi partisipasi keaktifan masyarakat dan memperlambat penurunan angka stunting di Kota Salatiga.

Saran

Penyebarluasan informasi mengenai program kerja pemerintah terkait stunting di Kota Salatiga masih sangat kurang, terbukti dari minimnya informasi tentang program aksi konvergensi penurunan angka stunting di Salatiga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, terutama kualitas jaringan internet, serta penguatan koordinasi antar lembaga melalui rapat rutin dan mekanisme komunikasi yang lebih cepat. Selain itu, pelatihan bagi staf Humas dan verifikator berita tentang pentingnya kecepatan dan akurasi informasi, serta manajemen emosi dan komunikasi efektif, menjadi sangat penting. Pemanfaatan media sosial yang optimal dan pembentukan tim khusus untuk merespons komentar dan pertanyaan dengan cepat juga dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Pengawasan dan evaluasi berkala serta penggunaan feedback dari masyarakat akan membantu memperbaiki peran komunikasi dan koordinasi, sehingga program kerja percepatan penurunan

stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan mengurangi angka stunting di Kota Salatiga. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan peran Humas dalam penyebarluasan informasi program kerja pemerintah mengenai stunting dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, C., & Setyanto, Y. (2019a). Peranan *Public Relations* Dalam Mempertahankan Eksistensi Ramayana. *Peranan Public Relations Dalam Mempertahankan Eksistensi Ramayana*, 3(2), 408–415. www.idx.co.id
- Anggraini, C., & Setyanto, Y. (2019b). Peranan *Public Relations* Dalam Mempertahankan Eksistensi Ramayana. *Prologia*, 3(2), 408–415. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pr.v3i2.6373>
- Aurima, J., Susaldi, S., Agustina, N., Masturoh, A., Rahmawati, R., & Tresiana Monika Madhe, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>
- Awaliyah, C., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Media Sosial Mempengaruhi Integrasi Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7868–7874.
- Baturangka, T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). PERAN DINAS SOSIAL KOTA MANADO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–9.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). ANALISIS DAMPAK KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH 1. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah*, 3(1), 100–114.
- Dwi Purwanti, W., Hadiwijoyo, S. S., Purnomo, D., Sosiologi, P., Satya, K., & Salatiga, W. (2023). Strukturasi Peran Bappeda Kota Salatiga dalam Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2021-2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1836–1845.
- Ginting, N., Simbolon, B. R., & Pin, P. (2023). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 201–211.
- Handayani, D. (2020). PEMANFAATAN YOUTUBE PADA SAAT PANDEMI COVID 19 UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DALAM MENINGKATKAN VOCABULARY DAN PEMAHAMAN SISWA. *JUPENDIK: JURNAL PENDIDIKAN*, 12(2).
- Hartono, A. (2016). Kebijakan dan Manajemen Publik KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: TAMAN FLORA DAN TAMAN EKSPRESI DI KOTA SURABAYA). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3).
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (2014). *Analisis data Kualitatif Terj* (T. Rohidi, Ed.). UI Press.
- Ipiyanto, M., Nidyawati, & Sepnonsal, D. (2022). Pengaruh Teladan Pimpinan, Pengawasan, Dan Komunikasi Dua Arah Terhadap Disiplin Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 343–356.
- Lubis, E. E. (2012). PERAN HUMAS DALAM MEMBENTUK CITRA PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 1–73.
- Majid, A. N., & Fitri, N. A. (2022). TUGAS HUMAS PEMERINTAHAN DALAM MENINGKATKAN

- PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI LEMBAGA PEMERINTAHAN. *Uin Walisogo Semarang*.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (cybermedia)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Normaisa, & Sudarmi. (2020). Peran Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal.Unismuh*, 1(3), 908–920. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Pratiwi, N. E., Mayopu, R. G., George, D., & Huwae, N. (2015). AKTIVITAS MEDIA RELATIONS HUMAS SETDA KOTA SALATIGA DALAM MEMBENTUK BERITA POSITIF. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(5), 330–345.
- Priyani Putri, H., Tasrif, M., Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, J., & Dakwah, D. (2022). ANALISIS TEKNIK PENULISAN BERITA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BERITA PADA MEDIA SOSIAL YOUTUBE JURNAL12 SKRIPSI Oleh. *IAIN Ponorogo*, 1–68.
- Qurotul Putri Riyadi, Raysa Nahtania, Hafsy Nur Abida, & Tria Patrianti. (2024). Personal Branding Ridwan Kamil Melalui Media Sosial Instagram Pasca Menjabat Sebagai Gubernur Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 4(1), 233–249. <https://doi.org/10.55606/juitik.v4i1.772>
- Setiawan, T., Kurniawati, J., & Saputro, E. (2019). KOMUNIKASI KRISIS DI ERA DIGITAL. *INTELEKTIVA : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*.
- Somantri, L. (2022). Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95. <https://doi.org/10.22146/mgi.70636>
- Sri Annisa, I., & Mailani, E. (2023). Journal Of Sosial Science Research. *Copyright@ Indah Sri Annisa, Elvi Mailani INNOVATIVE: Journal Of Sosial Science Research*, 3(2), 6469–6477.
- Susanto, D., Jailani, Ms., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 53–61. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Wijaya, S. I. (2015). PERENCANAAN DAN PERAN KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN. *E-Journal IAIN Samarinda (Institut Agama Islam Negeri)*, 18(1), 53–61.
- Zunaida, D., & Hayat. (2015). Hubungan Tingkat Motivasi Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Relationships Motivation Levels Using Sosial Networking Sites Facebook to Student Learning Outcomes 1). *Jurnal Pekommas*, 18(1), 63–72.